



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RADEN MURWANTARA
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 415767

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2427 m2/50 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/60 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 465.500.000

1. MOTOR, YAMAHA GEAR 125 S VERSION Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOBIL, TOYOTA VELOZ Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 298.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 18.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 150.122.624

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.583.622.624

III. HUTANG Rp. 739.168.840

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

2.844.453.784

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.